



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)  
**UNIT KERJA** : BPK PERWAKILAN PROVINSI ACEH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MASMUDI
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 57148

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.910.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 392 m<sup>2</sup>/280 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 382 m<sup>2</sup>/100 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
3. Tanah Seluas 2774 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 641.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOBIL, KIA PICANTO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 98.000.000
5. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 265.450.000**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 771.890.827**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 4.588.840.827



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.588.840.827

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.